

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, dan Soejono. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta. Rineka Cipta. 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press. 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta. Bhuana Ilmu Populer. 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Jakarta. Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. 2013.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Setara Press. Malang. 2012.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang. Setara Press. 2015.
- Azhari, Muhammad Tahir. *Negara hukum; Suatu Study tentang prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Kencana. 2010.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bogor. Kencana. 2003.
- Bachtiar. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian UU terhadap UUD*. Jakarta. Raih Asa Sukses. 2015.

- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*. Bandung. PT. Refika Aditama. Bandung. 2010.
- Dewi, Sinta. *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung. Widya Padjajaran. 2009.
- Efendy, Marwan, *Kejaksaan RI; Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- Garner, Bryan A. (ed.), *Black's Law Dictionary, 8th Edition*. St. Paul. West Pub. Co., 2004.
- Gultom, Olisias Gultom. *Perlindungan Data Pribadi: Di Indonesia Menyikapi Liberalisasi Ekonomi Digital*. Jakarta. International for Global Justice, 2021.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. Bina Ilmu. 1987.
- Hsb, Ali Marwan. *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*. Jakarta. Setara Press. 2017.
- Isbatullah, Dedi dan Benni Ahmad Saebani. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Bandung. Pustaka Setia. 2009.
- Isharyanto. *Hukum Kelembagaan Negara*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. 2015.

- Komisi Informasi Pusat. *Rencana Strategis 2022-2026*. (Jakarta: KIP, 2022).
- Kusnadi, Moh. dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*. Jakarta. Gaya Media Pratama. 2000.
- Laksana, Angela Augusta. *Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital Melalui Pemenuhan Adequacy Decision EU-GDPR: Perbandingan Lembaga Pelaksana PDP Indonesia dan Argentina*. Semarang. 2021.
- Liu, Nancy Yue. *Bio-Privacy: Privacy Regulations and the Challenge of Biometrics*. Oxon. Routledge. 2012.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta. Rajawali Press, 2003.
- Marbun S.F. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi*. Yogyakarta. UII Press. 2011.
- MD. Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. (Jakarta.Pustaka LP3ES. 2006.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan, Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta. Rajawali Press. 2016.
- Nurijahjo, Hendra. *Lembaga Independen di Indonesia: Kapan Pendahuluan Perspektif Yuridis, Makuluh dalam Diskusi Terbatas tentang Kelembagaan Independeti di Indonesia di Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara. 2006.
- Purwanto. *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital*. Jakarta. BPHN Departemen Hukum dan HAM. 2007.

- Roestandi, Achmad. *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*. Jakarta. Setjen dan Kepaniteraan MK.2005.
- Santoso, M. Jodi dan Wahyudi Djafar. *Perlindungan Data Pribadi: Pentingnya Otoritas Pengawasan Independen*. ELSAM. Jakarta. 2019.
- Satjipto Rahardjo. *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*. Jakarta. Makalah Seminar Nasional. 2023.
- SD., Rosadi. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. Bandung. Refika Aditama.
- Shin dan Kim. *Korea's PIPC Releases Comprehensive Guidelines on Processing Pseudonymized Data*. Seoul: Shin & Kim LLC's. 2020.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung. Mandar Maju. 2000.
- Smedinghodd, Thomas J (ed.). *Online Law: The SPA's Legal Guide to Doing Business on the Internet*. Kanada Addison Wesley Developers Press, .1999.
- Soemantri, Sri. *Ketetapan MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*. Bandung: .Remadja Karya, 1985.
- Tankard, James dan Werner J. Severin. *Teori Komunikasi Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 200.
- Taufani, Galang dan Suteki. *Metode Penulisan Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok. PT Raja Grafindo Persada 2020.

Tim Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Antar Lembaga Negara. Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2009.

Tim Perumus NA RUU PDP. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta. BPHN. 2020.

Utrecht, E.. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta. Erlangga. 2010.

Waldo, James. *Engaging Privacy and Information Technology in A Digital Age*. Washington D.C: National Research Council of The National Academies. Washington DC. National Academies Press. 2005.

## **Jurnal**

Aldo, Muhammad. “Pengaplikasian Kepemimpinan Kolektif Kolegial Organisasi Muhammadiyah.” *Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*. No. 2. (2018).

Aswandi, Bobi dan Kholis. “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)”. *Jurnal Pembangunan Hukum*. No. 1. (2019).

Basarah, Ahmad. “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State’s Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal MMH*. No. 1. (Januari 2014).

Bunyamin A. & Uu Nurul .H. “Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Hukum dan Peradilan*. No.1. (2013).

- Bunyamin, dan Huda. "Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*. No. 1. (Maret, 2013).
- D., Samuel and Louis D. Brandeis Warren. "The Right to Privacy," *Harvard Law Review*, No. 5, (Desember, 1980).
- Doly, Penico. "Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru." *Jurnal Negara Hukum*. No. 2. (2021).
- Fathoni, A., dan I. Pramudya. "Internet of Things Memasuki Era Society 5.0." *Jurnal Komputer, Informasi Teknologi, dan Elektro*. No. 1. (2023).
- Greenleaf, Graham. "Japan and Korea: Different paths to EU adequacy". *Privacy Laws & Business International Journal*. No. 1. (Desember, 2018).
- Tauda, Gunawana. "Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Pranata Hukum*. No. 2. (2011).
- Hakim, Lukman. "Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." *Jurnal Konstitusi Puskasi Universitas Widyagama Malang*. No. 2. (November, 2009).
- Hantoro, Novianto M.. "Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara." *Jurnal Negara Hukum*. No. 2. (November, 2016).
- Institute for Digital Rights. "Study on How to Improve the Personal Information Protection Legal System in Accordance With International Human Rights

- Standards Such as the European Union General Data Protection Regulation (GDPR).” No. 1. (November 16, 2020).
- Jazuly, Yukron. “Independent Agencies Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” *Supremasi Hukum*. No.1. (2015).
- Kaelan, K.. “Peran Filsafat Bagi Pengembangan Daerah Dan Peningkatan Semangat Kebangsaan.” *Jurnal Filsafat*. No. 2. (Agustus, 2007).
- Maria, Alexandra Maria. “The right to Data Protection Adequacy Decision.” *EU Law Journal*, No. 1. (July, 2015).
- Moeheriono. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. (Surabaya: Ghalia Indonesia Sriwidodo, 2010).
- Nurtjahjo, Hendra. “Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*. (Juli-September, 2005).
- Park, Kwang Bae dan Hwan Kyoung Ko dan Sunhee Chae of Lee. “Korea amends Personal Information Protection Act”. *Privacy Laws & Business International Report*. No. 1. (Februari, 2020).
- Pratama, Geistiar Yoga. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Hukum*. No. 3, (2016).
- Rahmah, Ratri Nur. “Upaya Membangun Kesadaran Keamanan Siber pada Konsumen E-commerce di Indonesia.” *Journal Trade and Development Study*. No. 1. (2022).

- Ramadani. “Lembaga Negara Independen di Indonesia dalam Perspektif Independent Regulatory Agencies.” *Ius Quia Iustum*. No. 1. (2020).
- Riskawati, A. Aco Agus. “Penanganan Kasus Cybercrime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar).” *Jurnal Supremasi*. No. 1. ( April, 2016).
- Safriani, Andi. “Komparasi Konstitusi Negara Modern Antara Indonesia Dan Korea Selatan.” *Jurnal Perbandingan Mazhab*. no. 1. (Desember, 2019).
- Siallagan, Haposan. “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia.” *Sosiohumaniora*. No. 2. (Juli,2016).
- Sinaga, Erlina Maria Christin dan Mery Christian Putri. “Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. No. 2. (2020).
- Supryadi, Ady dkk.. “Negara Hukum Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Literatur Review.” No. 2. ( September 2023).
- Tauda, Gunawan A.. “Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia”. *Jurnal Pranata Hukum*. No. 2. ( Juli, 2011).
- The Constitutional Court of South Korea Decision 99Hunma513, 2004Hunma190.
- Yuniarti, S., Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia, *Business Economic. Communication, and Social Sciences*). No. 1. (2019).

## **Peraturan**

European Union Guideline Data Protection Regulation



Human Rights Committee General Comment No. 16 (1988).

OECD Guidelines governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of  
Personal Data.

Personal Information Protection Act South Korea

UN Doc. A/HRC/17/27, Report of The Special Rapporteur on the Promotion and  
Protection of The Right to Freedom of Opinion and Expression.

UN Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files Adopted  
by General Assembly resolution 45/95 of 14 December 1990. Principle of  
Supervision and Sanctions.

UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

### **Internet**

BBC News Indonesia. “Ratusan juta data Dukcapil Kemendagri diduga bocor,  
pakar siber: ‘ini peretasan paling parah’”. (2023).  
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c51v25916zlo>.

CNN Indonesia. “Pembahasan RUU PDP Deadlock, DPR Sebut Kominfo Egois.”  
(2021). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210702015634-32-662082/pembahasan-ruu-pdp-deadlock-dpr-sebut-kominfo-egois>.

Data Protection Commission, “Transfers of Personal Data to Third Countries or  
International Organisations”,

<https://www.dataprotection.ie/en/organisations/international-transfers/transfers-personal-data-third-countries-or-international-organisations>

European Commission, “Adequacy Decisions.” [https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions\\_en](https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

European Commission, “Adequacy Decision”, [https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions\\_en](https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

European Data Protection Supervisor, “Data Protection”, [https://www.edps.europa.eu/data-protection/dataprotection\\_en#:~:text=Privacy%20%E2%80%93%20a%20fundamental%20right&text=The%20right%20to%20privacy%20or,Fundamental%20Rights%20\(Article%207\)](https://www.edps.europa.eu/data-protection/dataprotection_en#:~:text=Privacy%20%E2%80%93%20a%20fundamental%20right&text=The%20right%20to%20privacy%20or,Fundamental%20Rights%20(Article%207)).

European Union, “Data Protection”, (2024), [https://www.edps.europa.eu/data-protection/data-protection\\_en#:~:text=What%20is%20Privacy%3F,but%20also%20a%20social%20value](https://www.edps.europa.eu/data-protection/data-protection_en#:~:text=What%20is%20Privacy%3F,but%20also%20a%20social%20value)

Kementerian Komunikasi dan Informatika. “UU PDP Akan Permudah Pertukaran Data dengan Negara Lain,” (2023). <https://aptika.kominfo.go.id/2020/11/uu-pdp-akan-permudah-pertukaran-data-dengan-negara-lain/>.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. “UU PDP Akan Permudah Pertukaran Data dengan Negara Lain,” <https://aprika.kominfo.go.id/2020/11/uu-pdp-akan-permudah-pertukaran-data-dengannegara-lain/>.

KPU RI. “Komisi Pemilihan Umum Mengusulkan Empat Hal Penting dalam Proses Penyempurnaan Undang-Undang Pemilu”.  
<https://www.kpu.go.id/berita/baca/9393/Komisi-Pemilihan-Umum--KPU--mengusulkan-empat-hal-penting-dalam-proses-penyempurnaan-Undang-undang--UU--Pemilu-dan-Pemilihan-yang-pelaksanaannya>.

Laksana, Angela Augusta. “Pemenuhan Adequacy Decision EU-GDPR dalam Pembentukan RUU Perlindungan Data Pribadi dan Bagaimana Urgensinya,” <https://heylaw.id/blog/pemenuhan-adequacy-decision-eu-gdpr-dalam-pembentukan-ruu-perlindungan-data-pribadi-bagaimana-urgensinya..>

Mutiara Cindy. (2023). “Indonesia Masuk 3 Besar Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak di Dunia.”  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>.

Privacy Internasional, “Part 7 - Independent Supervisory Authority”, 2018, ,  
<https://privacyinternational.org/report/2245/part-7-independent-supervisory-authority>